

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Arsad Dahri¹, Julhadi², Sri Wahyuni³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

¹arsadlailan@gmail.com, ²julhadi15@gmail.com,

³sriwahyuni20201988@gmail.com

ABSTRACT

The phenomena of discrimination, intercultural stereotypes, the dominance of majority culture in the curriculum, and teachers' lack of understanding of diversity are critical issues in the education system. This study aims to identify multicultural issues in education in Indonesia, analyze their impact on the teaching and learning process, and formulate strategic solutions for the development of effective multicultural education. The methodology used is a literature review with descriptive-qualitative analysis of various literature sources, scientific journals, and policy documents related to multicultural education. The results of the study indicate that multicultural education has not been optimally implemented due to an exclusive curriculum, insufficient teacher training, and weak educational policies that are unresponsive to diversity. As a result, students from minority groups experience marginalization, decreased motivation to learn, and feelings of alienation.

Keywords: Multicultural Education, Diversity, Educational Inclusion

ABSTRAK

Fenomena diskriminasi, stereotip antarbudaya, dominasi budaya mayoritas dalam kurikulum, serta kurangnya pemahaman guru terhadap keberagaman menjadi isu kritis dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu multikultural dalam pendidikan di Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap proses belajar mengajar, serta merumuskan solusi strategis untuk pengembangan pendidikan multikultural yang efektif. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai sumber pustaka, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait pendidikan multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural belum terimplementasi secara optimal akibat kurikulum yang tidak inklusif, minimnya pelatihan guru, dan lemahnya kebijakan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman. Dampaknya, siswa dari kelompok minoritas mengalami marginalisasi, penurunan motivasi belajar, dan perasaan terasing.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Keberagaman, Inklusi Pendidikan

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa yang luar biasa, menghadirkan realitas sosial yang unik sekaligus kompleks dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, keberagaman bukan sekadar fakta demografis, melainkan menjadi fondasi identitas nasional yang harus dijaga dan dihargai. Namun, dalam praktik pendidikannya, keragaman ini sering kali tidak dikelola secara inklusif, bahkan cenderung terabaikan dalam struktur kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah.

Fenomena ini membuka celah bagi munculnya diskriminasi, stereotip, dan marginalisasi terhadap siswa dari kelompok minoritas, baik secara etnis, agama, maupun latar belakang sosial-ekonomi. Dalam konteks inilah pendidikan multikultural hadir sebagai pendekatan strategis yang tidak hanya relevan, tetapi mendesak untuk diimplementasikan secara sistematis.

Pendidikan multikultural, dalam konsepnya, bukan sekadar memasukkan konten budaya lokal ke dalam pembelajaran, melainkan merupakan transformasi paradigmatis dalam sistem pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan, penanaman nilai toleransi, dan pembentukan karakter demokratis. Seperti dikemukakan oleh Widjajanti, Rudiyanto, dan Kasanova (2021), pendidikan multikultural berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap identitas budaya setiap individu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pendekatan ini masih sangat terbatas.

Kurikulum nasional yang cenderung didominasi oleh budaya mayoritas, minimnya pelatihan guru dalam mengelola kelas multikultural, serta kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif, menjadi hambatan struktural yang mengakibatkan banyak siswa dari kelompok marjinal merasa tidak terwakili dan terasing dalam proses belajar. Hal ini diperparah oleh faktor

bahasa, di mana siswa yang menggunakan bahasa ibu berbeda dengan bahasa pengantar sekolah sering mengalami kesulitan pemahaman, sehingga berdampak langsung pada prestasi akademik mereka (Ainiyah, 2024).

Fakta lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah masih adanya praktik diskriminatif di lingkungan sekolah, baik yang terselubung maupun terbuka, yang menyasar siswa berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Wijayanti dan Hidayat (2023) menunjukkan bahwa diskriminasi semacam ini tidak hanya menurunkan motivasi belajar, tetapi juga merusak perkembangan psikososial peserta didik, memicu rasa tidak aman, dan menghambat terbentuknya kohesi sosial sejak usia dini.

Di sisi lain, ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak dari daerah terpencil atau kelompok rentan menunjukkan bahwa isu multikultural tidak bisa dilepaskan dari dimensi struktural ketidakadilan sosial (Komalasari, 2022). Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan ini semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya arus informasi yang

kadang justru memperkuat bias budaya dan intoleransi jika tidak diimbangi dengan literasi multikultural yang memadai.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan teori pendidikan multikultural, studi keberagaman, dan kebijakan pendidikan inklusif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga adil, inklusif, dan mampu menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat majemuk. Dengan demikian, pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan wadah pembentukan generasi yang toleran, kritis, dan menghargai perbedaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai metode utama dalam mengkaji isu-isu multikultural dalam pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, dan pendidikan yang kompleks,

terutama dalam konteks keragaman dan inklusivitas. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap makna, konteks, dan dinamika sosial yang mendasari tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural, bukan hanya menggambarkan data secara numerik, melainkan menganalisis secara kritis realitas yang terjadi di lapangan.

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku teks, artikel dari jurnal nasional terakreditasi, prosiding seminar, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi terkait pendidikan dan keberagaman di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas, kebaruan (relevansi zaman), dan kedekatannya dengan tema penelitian. Beberapa referensi utama berasal dari penelitian terdahulu yang membahas konsep pendidikan multikultural, isu diskriminasi di lingkungan sekolah, dominasi budaya mayoritas dalam kurikulum, serta strategi pengembangan pendidikan inklusif (seperti Widjajanti et al., 2021;

Ainiyah, 2024; Wijayanti & Hidayat, 2023; Komalasari, 2022).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan: (1) identifikasi tema utama dari literatur, (2) kategorisasi isu-isu multikultural berdasarkan jenis dan dampaknya, (3) analisis kritis terhadap faktor-faktor penyebab dan hambatan struktural, serta (4) penyusunan rekomendasi solutif yang kontekstual. Proses analisis dilakukan secara tematik, memastikan bahwa setiap argumen yang dikemukakan didukung oleh data dan teori yang valid, serta sesuai dengan realitas pendidikan di Indonesia.

Pemilihan metode ini dianggap tepat karena penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas isu multikultural secara holistik, bukan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan secara statistik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam bagi pengembangan kebijakan, praktik pedagogis, dan budaya sekolah yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai literatur dan dokumen kebijakan terkait pendidikan di Indonesia, penelitian ini mengungkap sejumlah temuan kunci mengenai isu-isu multikultural dalam pendidikan, dampaknya terhadap proses belajar-mengajar, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang esensial dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendidikan multikultural bukan sekadar memasukkan konten budaya lokal ke dalam kurikulum, melainkan merupakan transformasi holistik yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan, penanaman nilai toleransi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Widjajanti, Rudiyanto, & Kasanova, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang demokratis, kritis, dan mampu hidup berdampingan dalam keragaman. Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan

multikultural di Indonesia masih jauh dari optimal.

Kedua, terdapat sejumlah isu multikultural yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional. Isu utama yang teridentifikasi meliputi: (1) *diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas* berdasarkan etnis, agama, atau latar belakang sosial; (2) *stereotip antarbudaya* yang mengakar dalam lingkungan sekolah dan memperkuat prasangka; (3) *eksklusi kebijakan pendidikan* yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok marjinal; dan (4) *dominasi budaya mayoritas dalam kurikulum nasional* yang mengabaikan keberagaman budaya lokal (Widjajanti & Mahendra, 2023; Anwar & Yulianto, 2023). Kurikulum yang homogen dan tidak merepresentasikan identitas budaya peserta didik menyebabkan marginalisasi dan perasaan tidak terwakili, terutama bagi siswa dari daerah terpencil atau kelompok etnis minoritas.

Ketiga, isu-isu multikultural tersebut berdampak negatif secara langsung terhadap proses pendidikan dan perkembangan peserta didik. Diskriminasi, baik yang terselubung maupun terbuka, menurunkan

motivasi belajar, merusak kepercayaan diri, dan mengganggu perkembangan psikososial siswa (Wijayanti & Hidayat, 2023). Siswa yang merasa terasing atau tidak dihargai cenderung menarik diri dari partisipasi aktif di kelas, mengalami penurunan prestasi akademik, dan rentan mengalami stres psikologis. Selain itu, sistem pendidikan yang tidak inklusif memperlebar jurang sosial dan berpotensi memicu konflik antarbudaya di tingkat yang lebih luas, sehingga mengancam kohesi sosial dan persatuan bangsa.

Keempat, tantangan struktural dalam implementasi pendidikan multikultural juga terlihat dari keterbatasan kapasitas guru dan kebijakan pendidikan yang belum mendukung penuh. Banyak guru belum dibekali dengan pelatihan yang memadai dalam mengelola kelas yang heterogen secara budaya, sehingga tidak mampu mengatasi konflik atau bias budaya secara efektif (Yuliana & Mahendra, 2021). Di sisi lain, minimnya kebijakan internal sekolah yang mendukung keberagaman, serta kurangnya regulasi nasional yang eksplisit melarang diskriminasi di lingkungan pendidikan, menjadi

hambatan sistemik dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif.

Kelima, sebagai solusi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi: (1) *reformasi kurikulum* agar lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia secara nyata, termasuk integrasi kearifan lokal dalam mata pelajaran sejarah, seni budaya, dan pendidikan karakter; (2) *pelatihan guru secara intensif* dalam pendidikan multikultural, manajemen kelas inklusif, dan kesadaran budaya (*cultural awareness*); (3) *penguatan kebijakan pendidikan* yang pro-keberagaman, seperti regulasi anti-diskriminasi, pendanaan untuk sekolah inklusif, dan pengembangan sekolah model multikultural; dan (4) *kolaborasi aktif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat*, termasuk tokoh agama, adat, dan orang tua, untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini (Putra & Sari, 2022; Kurniawan & Hasanah, 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya kebutuhan, tetapi sebuah keniscayaan dalam

membangun bangsa Indonesia yang adil, damai, dan kuat secara sosial. Keberhasilan penerapannya memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas. Dengan pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, pendidikan dapat bertransformasi menjadi wahana pemersatu yang efektif di tengah keberagaman.

Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, meskipun keberadaannya sangat strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Temuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas sistemik dalam dunia pendidikan, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap paradigma pendidikan nasional yang cenderung homogen dan sentralistik. Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, pendidikan tidak boleh lagi dilihat sebagai alat homogenisasi identitas,

melainkan sebagai wahana transformasi sosial yang menghargai keragaman sebagai kekayaan bangsa.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah dominasi budaya mayoritas dalam kurikulum nasional, yang menyebabkan marginalisasi identitas budaya lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Farida dan Supriyadi (2022), yang menyatakan bahwa kurikulum yang tidak inklusif dapat menimbulkan perasaan terasing pada peserta didik dari kelompok minoritas. Ketika siswa tidak melihat dirinya tercermin dalam materi pelajaran—baik dalam bentuk bahasa, sejarah, maupun nilai-nilai budaya—maka mereka cenderung kehilangan keterikatan emosional terhadap proses belajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen teknis, melainkan juga alat politik budaya yang bisa memperkuat atau meruntuhkan keadilan sosial dalam pendidikan.

Temuan tentang diskriminasi dan stereotip antarbudaya di lingkungan sekolah juga menguatkan hasil penelitian Wijayanti dan Hidayat (2023), yang menemukan bahwa

diskriminasi, meskipun sering kali terselubung, berdampak signifikan terhadap motivasi belajar dan perkembangan psikososial siswa. Praktik seperti membedakan siswa berdasarkan etnis, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi tidak hanya melanggar prinsip dasar pendidikan yang adil, tetapi juga berpotensi menanamkan prasangka sejak dini. Ironisnya, sekolah—yang seharusnya menjadi ruang netral dan inklusif—justru dapat menjadi arena reproduksi ketidakadilan sosial jika tidak dikelola dengan pendekatan multikultural yang kritis.

Lebih jauh, temuan mengenai keterbatasan kapasitas guru dalam mengelola kelas multikultural menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dan realitas praktik di lapangan. Banyak guru belum dibekali dengan pemahaman memadai tentang kesadaran budaya (*cultural awareness*), empati antarbudaya, dan teknik pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan. Hal ini selaras dengan penelitian Yuliana dan Mahendra (2021), yang menekankan pentingnya pelatihan guru berkelanjutan dalam pendidikan multikultural. Tanpa intervensi

sistematis dalam pengembangan profesional guru, maka upaya transformasi pendidikan multikultural akan sulit terwujud secara menyeluruh.

Dari sisi kebijakan, minimnya regulasi eksplisit yang melindungi siswa dari diskriminasi di sekolah menjadi temuan yang kritis. Meskipun ada wacana tentang sekolah inklusif, belum ada payung hukum nasional yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap hak budaya peserta didik. Kondisi ini mencerminkan belum kuatnya komitmen struktural terhadap pendidikan multikultural. Namun, temuan positif tentang perlunya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai toleransi menggarisbawahi bahwa pendidikan multikultural bukan tanggung jawab tunggal institusi formal, melainkan gerakan kolektif yang harus dibangun secara sinergis.

Implikasi dari temuan ini sangat luas. Pertama, dari sisi kebijakan, pemerintah perlu segera merancang dan mengesahkan regulasi yang menjamin inklusivitas dalam pendidikan, termasuk larangan diskriminasi berbasis etnis, agama,

dan budaya. Kedua, kurikulum nasional harus direformasi secara mendasar agar tidak hanya memasukkan konten lokal secara simbolik, tetapi benar-benar merepresentasikan keberagaman sebagai inti dari pembelajaran. Ketiga, lembaga pendidikan guru (LPTK) dan dinas pendidikan harus menjadikan pendidikan multikultural sebagai bagian wajib dalam pelatihan dan pengembangan guru. Keempat, sekolah perlu mengembangkan kebijakan internal yang eksplisit mendukung keberagaman, seperti program pertukaran budaya, hari keberagaman, atau forum dialog antarbudaya.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat argumen Widjajanti, Rudiyanto, dan Kasanova (2021) bahwa pendidikan multikultural harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanpa dukungan struktural—dalam bentuk kebijakan, pelatihan, dan sumber daya—maka nilai-nilai tersebut akan tetap menjadi wacana normatif tanpa realisasi praktis.

E. Kesimpulan

Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis menghadapi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil, di mana diskriminasi, dominasi budaya mayoritas dalam kurikulum, serta kurangnya pemahaman guru terhadap keberagaman menjadi hambatan utama. Pendidikan multikultural hadir sebagai solusi strategis untuk menanamkan nilai toleransi, keadilan sosial, dan karakter demokratis, namun implementasinya masih terkendala oleh minimnya kebijakan yang mendukung, pelatihan guru yang belum memadai, serta kurangnya representasi budaya lokal dalam sistem pendidikan. Untuk itu, diperlukan reformasi kurikulum yang inklusif, pelatihan guru berbasis kesadaran budaya, kebijakan anti-diskriminasi, dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pendidikan mampu menjadi wahana pemersatu bangsa dan menciptakan generasi yang menghargai perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., & Syaodih, N. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anwar, F., & Yulianto, S. (2023). Kebijakan pendidikan dan keberagaman budaya di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Studi Pendidikan Multikultural*, 6(2), 77–88.
- Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: Guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Farida, D. A., & Supriyadi, M. (2022). Kurikulum inklusif: Membangun keberagaman dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 8(1), 87–101.
- Hendra, T., & Salim, R. (2021). Pendidikan multikultural untuk mengatasi perasaan terasing siswa dari kelompok minoritas. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 4(3), 112–124.
- Hidayat, T., & Ramadhani, F. (2020). Manajemen kelas inklusif dalam konteks keberagaman budaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(4), 89–101.
- Komalasari, D. (2022). Ketimpangan sosial dan akses pendidikan. *Jurnal Sosialita*, 4(1), 55–63.
- Kurniawan, A. (2020). *Membangun budaya sekolah inklusif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, D., & Hasanah, L. (2023). Kebijakan pendidikan anti-diskriminasi di sekolah multikultural. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 5(2), 58–72.
- Nurchahyo, R., & Wahyuni, D. (2020). Pendidikan berbasis keberagaman budaya: Menumbuhkan identitas siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 7(2), 98–110.
- Putra, R. A., & Sari, M. T. (2022). Kurikulum multikultural dan pembentukan identitas budaya siswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 210–223.
- Saputra, R. (2023). Penerapan pendidikan multikultural di sekolah dasar. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 14(1).
- Sari, M. T., & Nugroho, S. (2021). Kebijakan internal sekolah dalam mendukung pendidikan berbasis keberagaman. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 8(1), 45–59.
- Widajanti, S., Rudiyanto, M., & Kasanova, R. (2021). Pelaksanaan pendidikan multikultural dalam kehidupan menuju Indonesia yang unggul. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 115–125.
- Widajanti, S., & Mahendra, A. (2023). Isu-isu multikultural dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 8(1), 45–59.
- Wijayanti, N., & Hidayat, S. (2023). Diskriminasi di lingkungan pendidikan dan dampaknya terhadap motivasi belajar siswa minoritas. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 7(3), 245–260.
- Yuliana, S., & Mahendra, A. (2021). Pelatihan guru dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 124–137.